

**STRATEGI SATLANTAS POLRES POSO DALAM RANGKA MEMBINA EKS  
NAPI TERORISME GUNA MENCIPTAKAN KAMTIBMAS DI WILAYAH  
HUKUM POLRES POSO**

***THE ROLE OF POSO POLICE TRAFFIC UNIT IN FOSTERING EX-TERRORISM  
INMATES TO CREATE PUBLIC ORDER AND SECURITY IN POSO POLICE  
JURISDICTION***

**Cahya Fajar Timur Amboina**

Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian  
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga  
Email: cahya.fajar@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis strategi Satlantas Polres Poso dalam membina eks narapidana terorisme untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan meliputi program LAPERA (Lantas Peduli Radikalisme) melalui pembuatan SIM untuk keluarga pelaku terorisme, pemberdayaan ekonomi, dan pendekatan kearifan lokal. Kendala yang dihadapi antara lain: keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan sulitnya medan persembunyian teroris. Penelitian merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas personel, peningkatan sarana prasarana, dan koordinasi antar stakeholder dalam pembinaan eks narapidana terorisme.

**Kata kunci:** Satlantas, Eks Napi Terorisme, Kamtibmas, Polres Poso

**ABSTRACT**

*This research analyzes the strategy of Poso Police Traffic Unit in fostering ex-terrorism inmates to create security and public order. The research method used is qualitative. The results show that the strategies implemented include the LAPERA program (Traffic Care for Radicalism) through driver's license issuance for terrorist families, economic empowerment, and local wisdom approach. The obstacles faced include: limited human resources, facilities and infrastructure, and difficult terrorist hiding terrain. The research recommends strengthening personnel capacity, improving infrastructure, and coordination between stakeholders in fostering ex-terrorism inmates.*

**Keywords:** *Traffic Police Unit, Ex-Terrorism Inmates, Public Order, Poso Police*

**1. PENDAHULUAN**

Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Program deradikalisasi menjadi salah satu strategi penting dalam

upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh berbagai institusi seperti BNPT, Polri, serta bekerjasama dengan tokoh agama, pemerintah daerah dan masyarakat.

Di wilayah Poso, radikalisme terbentuk diawali dengan konflik komunal dan kekecewaan terhadap aparat terutama Polri dalam penanganan konflik yang dianggap tidak adil. Saat ini tercatat terdapat 43-56 narapidana terorisme asal Kabupaten Poso yang masih menjalani penahanan di beberapa Lapas di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini memerlukan penanganan khusus dengan mengedepankan kearifan lokal yang berlaku di wilayah Kabupaten Poso.

Peran Polri, khususnya Polres Poso, dalam proses penanganan deradikalisasi telah dilakukan melalui beberapa upaya, di antaranya program polisi mandago raya/polisi yang baik hati yang mengangkat kearifan lokal. Program ini menyentuh secara dini dengan melakukan komunikasi yang baik dengan napi terorisme dan keluarganya serta eks teroris dan keluarganya dengan melibatkan Bhabinkamtibmas. Polisi lokal Bhabinkamtibmas dipilih karena lebih mengetahui karakteristik wilayah dan warganya.

Satuan Lalu Lintas Polres Poso turut berkontribusi melalui program LAPERA (Lantas Peduli Radikalisme) yang memberikan program pembuatan SIM kepada keluarga pelaku terorisme yang masih menjalani hukuman dan eks terorisme beserta keluarganya. Program ini bertujuan membangun kepatuhan hukum dan membuka akses terhadap layanan publik. Selain itu, terkait kesejahteraan ekonomi, Polri mengarahkan dan memfasilitasi mereka untuk bekerja dan produktif dalam hal yang positif.

Namun demikian, penanganan deradikalisasi secara terintegral dengan Pemerintah kabupaten, Kodim dan BNPT masih belum optimal. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, khususnya di wilayah hukum Poso agar dapat mengoptimalkan peran Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam membina eks napi terorisme di masyarakat Poso. Hal ini menjadi semakin penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami atau tidak menyadari pentingnya ketertiban dalam bermasyarakat.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersirat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional. Tindak pidana terorisme yang terjadi di Kabupaten Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan kendala yang dihadapi Satlantas Polres Poso dalam membina eks narapidana terorisme guna menciptakan kamtibmas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk optimalisasi peran Polri dalam mencegah dan menangani permasalahan terorisme di wilayah Poso melalui pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kearifan lokal.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kasatlantas Polres Poso, Unit Bhabinkamtibmas Polres Poso, dan masyarakat di wilayah hukum Poso. Observasi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata implementasi program pembinaan eks narapidana terorisme di lapangan.

Penanganan radikalisme di Kabupaten Poso memerlukan suatu program terintegrasi yang mencakup deradikalisasi, kontraradikalisasi dan rehabilitasi dengan mengedepankan peran polisi lokal. Legalitas dari pelaksanaan program deradikalisasi oleh Polri tertuang dalam Commander Wish Kapolri poin 4, misi Kapolri poin 7 dan Program Kapolri poin 3 dan 8, serta Quick Wins Kapolri poin 2 yang kemudian Polres Poso menuangkan dalam program "Madago Raya".

Penguatan peran polisi lokal personel Polres Poso dalam kegiatan deradikalisasi dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, mapping wilayah radikalisme untuk mengidentifikasi zona-zona rawan. Kedua, membangun sinergitas penanganan radikalisme dengan stakeholder terkait. Ketiga, mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam upaya pencegahan. Untuk kontra deradikalisasi, dilakukan penentuan klasifikasi kelurahan/desa dengan karakteristik ancaman radikalisme, pendataan jumlah korban radikalisme, dan pelaksanaan kegiatan Operasi Cipta Kepolisian.

Yang menarik dalam konteks Poso adalah latar belakang mantan napiter melakukan tindakan terorisme bukan murni karena faktor ideologi melainkan faktor dendam saat konflik Poso terjadi yang banyak memakan korban dari pihak keluarga mereka. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk mempengaruhi pemuda-pemuda Poso dengan doktrin-doktrin yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya.

Satlantas Polres Poso sebagai bagian integral dari institusi kepolisian memiliki peran strategis dalam upaya pembinaan eks narapidana terorisme. Melalui program LAPERA, unit ini tidak hanya menjalankan fungsi reguler dalam bidang lalu lintas, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan administratif dan

pemberdayaan. Pendekatan ini dinilai efektif karena menyentuh kebutuhan praktis masyarakat sekaligus membangun kesadaran hukum.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis efektivitas strategi yang diterapkan Satlantas Polres Poso serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pembinaan eks narapidana terorisme yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah konflik seperti Poso.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori citra etik Polri sebagai penegak hukum dan konsep deradikalisasi. Penelitian juga mempertimbangkan aspek optimalisasi sumber daya manusia Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak program pembinaan di lapangan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang strategi dan implementasi program pembinaan eks narapidana terorisme di wilayah hukum Polres Poso.

## **2. PEMBAHASAN**

Strategi Satlantas Polres Poso dalam membina eks narapidana terorisme menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Program yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat Poso. Berikut adalah analisis mendalam tentang strategi-strategi yang diterapkan:

Program LAPERA (Lantas Peduli Radikalisme) menjadi inovasi unggulan Satlantas Polres Poso dalam upaya pembinaan eks narapidana terorisme. Program ini berangkat dari pemahaman bahwa pembinaan perlu dimulai dari hal-hal fundamental yang menyentuh kehidupan sehari-hari mantan narapidana dan keluarganya. Pembuatan SIM bagi keluarga pelaku terorisme bukan sekadar layanan administratif, tetapi merupakan pintu masuk untuk membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan hukum.

Melalui program LAPERA, Satlantas Polres Poso berhasil menciptakan mekanisme engagement yang efektif dengan komunitas eks narapidana terorisme. Proses pembuatan SIM menjadi momentum untuk menjalin komunikasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya tertib administrasi dan kepatuhan hukum. Lebih dari itu, kepemilikan SIM membuka akses terhadap berbagai layanan publik lainnya, yang pada gilirannya memudahkan proses reintegrasi sosial eks narapidana terorisme ke dalam masyarakat.

Pendekatan kearifan lokal melalui program "Madago Raya" merupakan strategi yang sangat relevan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Poso. Program

ini mengangkat nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam masyarakat sebagai basis pembinaan. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari pelibatan aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat.

"Madago Raya" tidak hanya menjadi slogan, tetapi diterjemahkan ke dalam berbagai aktivitas konkret yang mempertemukan eks narapidana terorisme dengan elemen masyarakat lainnya. Dialog dan komunikasi yang dibangun bersifat dua arah, memberikan ruang bagi eks narapidana untuk mengekspresikan aspirasi mereka sekaligus menerima masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun mutual understanding dan meredam potensi konflik.

Aspek pemberdayaan ekonomi menjadi komponen penting dalam strategi pembinaan. Satlantas Polres Poso menyadari bahwa ketahanan ekonomi merupakan faktor krusial dalam mencegah eks narapidana kembali ke jaringan terorisme. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, eks narapidana difasilitasi untuk mengakses peluang kerja dan usaha. Pelatihan keterampilan diberikan sesuai dengan minat dan potensi masing-masing, mulai dari keterampilan teknis hingga manajemen usaha kecil.

Program pemberdayaan ekonomi tidak berhenti pada pemberian bantuan atau pelatihan semata. Satlantas Polres Poso membangun sistem pendampingan berkelanjutan untuk memastikan eks narapidana dapat mengembangkan kemandirian ekonomi mereka. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan solusi yang diperlukan.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program pembinaan. Satlantas Polres Poso membangun jejaring kerjasama yang solid dengan berbagai stakeholder, mulai dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga sektor swasta. Sinergitas ini memungkinkan optimalisasi sumber daya dan mencegah tumpang tindih program.

Peran Bhabinkamtibmas dioptimalkan sebagai ujung tombak program di tingkat grass root. Dengan pengetahuan mendalam tentang kondisi lapangan dan kedekatan dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi radikalisme sekaligus memfasilitasi proses pembinaan eks narapidana. Fungsi intelijen juga diperkuat untuk memantau dinamika di lapangan dan mengantisipasi munculnya ancaman baru.

Keberhasilan program pembinaan eks narapidana terorisme di Polres Poso tidak terlepas dari beberapa faktor kunci. Pertama, sinergitas seluruh komponen bangsa yang terbangun melalui koordinasi intensif dan pembagian peran yang jelas. Kedua, penguatan nilai-nilai lokal yang menjadi landasan

program dan memudahkan penerimaan masyarakat. Ketiga, pendekatan humanis dan persuasif yang mengedepankan dialog dan pemberdayaan dibanding pendekatan koersif. Keempat, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembinaan dan pengawasan.

Program pembinaan eks narapidana terorisme di Polres Poso menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif yang memadukan aspek keamanan, sosial, ekonomi, dan kultural dapat memberikan hasil yang optimal. Keberhasilan program ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan strategi pembinaan eks narapidana terorisme yang efektif dan berkelanjutan.

Pengalaman Polres Poso juga menunjukkan pentingnya adaptasi program dengan konteks lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam penanganan eks narapidana terorisme. Oleh karena itu, replikasi program perlu mempertimbangkan aspek lokalitas dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Lebih jauh, keberhasilan program ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendekatan yang humanis dan berbasis pemberdayaan dalam penanganan eks narapidana terorisme. Pendekatan keamanan semata terbukti tidak cukup efektif tanpa diimbangi dengan upaya pemberdayaan dan reintegrasi sosial yang komprehensif.

Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan program dan penguatan kapasitas kelembagaan. Diperlukan sistem yang dapat memastikan program terus berjalan meski terjadi pergantian personel atau perubahan kebijakan. Selain itu, penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung juga perlu menjadi prioritas untuk mengoptimalkan hasil program pembinaan.

Implementasi strategi pembinaan eks narapidana terorisme oleh Satlantas Polres Poso juga menunjukkan beberapa temuan penting terkait efektivitas program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Poso, AKBP Bogiek Sugiarto, S.H., S.I.K., pendekatan yang dilakukan telah berhasil mencegah munculnya aksi-aksi teror baru dalam dua tahun terakhir. Bahkan ketika terjadi insiden di Mako Brimob Kelapa Dua dan bom bunuh diri di Surabaya, eks narapidana terorisme di Poso tidak terpengaruh untuk melakukan aksi serupa.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari pemahaman mendalam tentang karakteristik khusus kasus terorisme di Poso. Berbeda dengan daerah lain, radikalisme di Poso lebih banyak dipicu oleh faktor dendam akibat konflik komunal masa lalu, bukan semata-mata oleh faktor ideologi. Pemahaman ini memungkinkan Satlantas Polres Poso merancang program pembinaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan akar permasalahan.

Program LAPERA, misalnya, tidak hanya berfokus pada aspek administratif pembuatan SIM, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan mengubah persepsi eks narapidana terhadap aparat kepolisian. Melalui pelayanan yang humanis dan profesional, program ini berhasil mengurangi stigma negatif dan kecurigaan yang sebelumnya menjadi hambatan dalam proses pembinaan.

Pendekatan kearifan lokal melalui program "Madago Raya" menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional masih memiliki relevansi kuat dalam upaya deradikalisasi. Program ini berhasil memobilisasi dukungan tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat. Seperti diungkapkan oleh salah satu mantan narapidana terorisme berinisial "HR", keterlibatan tokoh lokal membantu mereka membangun kembali kepercayaan diri dan menemukan cara-cara damai dalam menyelesaikan persoalan.

Aspek pemberdayaan ekonomi menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam membangun kemandirian eks narapidana. Program pelatihan keterampilan dan fasilitasi akses usaha tidak hanya membantu mereka secara finansial, tetapi juga memberikan kesibukan positif yang mengalihkan perhatian dari aktivitas-aktivitas destruktif. Beberapa eks narapidana bahkan telah berhasil mengembangkan usaha kecil yang mempekerjakan anggota masyarakat lain.

Koordinasi lintas sektor yang dibangun Satlantas Polres Poso melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BNPT, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil. Meski belum optimal, koordinasi ini telah memungkinkan sharing sumber daya dan pertukaran informasi yang bermanfaat untuk pengembangan program. Peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak di lapangan juga semakin diperkuat dengan pelatihan khusus tentang penanganan eks narapidana terorisme.

Namun demikian, program pembinaan masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang menghambat optimalisasi program. Kedua, masih adanya stigma sosial terhadap eks narapidana terorisme yang mempengaruhi proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Ketiga, kompleksitas medan geografis Poso yang menyulitkan monitoring dan pengawasan.

Pengalaman Polres Poso dalam membina eks narapidana terorisme memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan keamanan dan pemberdayaan, yang dilandasi pemahaman mendalam tentang kondisi lokal, dapat menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan.

Ke depan, penguatan program pembinaan dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan khusus tentang penanganan eks narapidana terorisme. Kedua, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis untuk mengukur efektivitas program. Ketiga, penguatan jejaring kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperluas jangkauan program.

Dalam konteks terorisme dan upaya deradikalisasi, perlu dipahami bahwa terorisme merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan memiliki motivasi beragam. Sebagaimana dikemukakan oleh Adams (1986: 6), terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada. Tindakan terorisme dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari korban-korban langsungnya.

Di wilayah Poso, faktor penyebab tindakan terorisme memiliki karakteristik khusus yang melibatkan beberapa aspek. Menurut Ali (2008), kejahatan terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polresta Poso memiliki beberapa faktor penyebab (trigger) atau bersifat multifaktorial, di antaranya:

1. Pemahaman terhadap ideologi/keyakinan radikal yang sesat
2. Kualitas pendidikan yang rendah
3. Tingkat ekonomi yang lemah
4. Pengatasnamaan jihad
5. Kesenjangan sosial
6. Solidaritas yang kuat antar kelompok
7. Kualitas personil kepolisian yang belum optimal

Dalam menghadapi kompleksitas ini, Polres Poso menerapkan berbagai strategi penanganan. Menurut Petrus R. Golose (2010), program deradikalisasi perlu diwujudkan melalui reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain. Program deradikalisasi harus mampu melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris atau menghentikan penyebaran ideologi tersebut.

Pendekatan yang dilakukan Satlantas Polres Poso sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Agus Surya Bakti (2014) tentang tahapan deradikalisasi yang meliputi identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Program LAPERA dan pendekatan kearifan lokal yang diterapkan merupakan bentuk konkret dari tahapan-tahapan tersebut.

Hikam (2016) menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam membendung radikalisme. Hal ini tercermin dalam strategi Polres Poso yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam program

pembinaan eks narapidana terorisme. Pelibatan ini menjadi kunci keberhasilan program karena dapat memobilisasi dukungan sosial dan memperkuat legitimasi program di mata masyarakat.

Khamdan (2010) menjelaskan bahwa pembinaan narapidana merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Program pembinaan diberikan sebagai rangkaian kegiatan untuk melepaskan narapidana dari hal-hal yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Satlantas Polres Poso untuk memberikan alternatif aktivitas positif bagi eks narapidana terorisme.

Menurut Wawan H. Purwanto (2010), strategi penguatan hukum dan deradikalisasi perlu dilakukan secara sinergis dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Koordinasi lintas sektor yang dibangun Satlantas Polres Poso dengan berbagai stakeholder mencerminkan implementasi strategi ini. Meski demikian, masih diperlukan penguatan koordinasi mengingat kompleksitas permasalahan terorisme di Poso.

Tantangan dalam implementasi program pembinaan eks narapidana terorisme di Poso juga sejalan dengan temuan Roma Tressa (2018) tentang kendala dalam kebijakan kontra radikalisme di Kabupaten Poso. Keterbatasan sumber daya, baik personel maupun infrastruktur, menjadi hambatan signifikan yang perlu diatasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan alokasi anggaran yang memadai.

### **3. PENUTUP**

#### Kesimpulan

Penelitian tentang strategi Satlantas Polres Poso dalam membina eks narapidana terorisme menunjukkan bahwa pendekatan persuasif yang komprehensif telah memberikan hasil yang positif dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi sosial. Program LAPERA (Lantas Peduli Radikalisme) menjadi inovasi unggulan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif pembuatan SIM, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan dan mengubah persepsi eks narapidana terhadap institusi kepolisian.

Pemberdayaan ekonomi melalui fasilitasi akses pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha terbukti efektif dalam memberikan alternatif kehidupan yang positif bagi eks narapidana terorisme. Program ini tidak hanya membantu mereka secara finansial, tetapi juga membangun kemandirian dan mencegah kembalinya mereka ke jaringan terorisme. Penguatan kearifan lokal melalui program "Madago Raya" berhasil

memobilisasi dukungan tokoh-tokoh masyarakat dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi proses reintegrasi.

Namun demikian, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala signifikan. Keterbatasan SDM dan kompetensi personel menjadi hambatan utama dalam optimalisasi program pembinaan. Minimnya sarana prasarana pendukung juga mempengaruhi jangkauan dan efektivitas program. Kondisi geografis Poso yang kompleks dengan medan persembunyian yang sulit dijangkau menambah tantangan dalam pengawasan dan monitoring eks narapidana terorisme.

Tantangan dalam memutus jaringan terorisme masih menjadi persoalan serius, mengingat kuatnya ikatan ideologis dan solidaritas kelompok. Kesulitan reintegrasi sosial eks narapidana terorisme juga masih dihadapi, terutama terkait stigma masyarakat dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Kendala-kendala ini membutuhkan pendekatan sistematis dan dukungan berbagai pihak untuk mengatasinya.

#### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis diusulkan untuk pengembangan program ke depan. Pertama, penguatan koordinasi antar stakeholder dalam pembinaan narapidana terorisme perlu ditingkatkan melalui pembentukan forum koordinasi reguler dan sistem informasi terpadu. Koordinasi ini mencakup institusi penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta yang dapat berkontribusi dalam program pembinaan.

Kedua, perlunya penempatan personel khusus Polri di Polres Poso yang memiliki kompetensi dalam pembinaan eks narapidana terorisme. Unit khusus seperti Densus 88 dengan pengalaman dan keahlian dalam penanganan terorisme dapat memberikan perspektif dan pendekatan yang lebih tepat sasaran. Penguatan kapasitas personel existing juga perlu dilakukan melalui pelatihan khusus dan transfer pengetahuan.

Ketiga, peningkatan anggaran dan sarana prasarana pendukung program pembinaan menjadi prioritas yang mendesak. Alokasi anggaran yang memadai diperlukan untuk mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan. Sarana prasarana seperti pusat pelatihan, kendaraan operasional, dan peralatan pendukung lainnya juga perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas program.

Implementasi rekomendasi ini membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak dan perencanaan yang matang. Evaluasi berkala terhadap pencapaian program dan penyesuaian strategi berdasarkan dinamika di lapangan juga

perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program pembinaan eks narapidana terorisme di wilayah hukum Polres Poso.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M.N. (2008). "Studi Terorisme di Sulawesi Tengah". Laporan Penelitian Hibah Fundamental, DP2M-Dikti dan Lemlit-Untad. Palu.
- Golose, P.R. (2010). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: PTIK.
- Hikam, M.A.S. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Khamdan, M. (2010). *Pesantren di Dalam Penjara*. Kudus: Parist.
- Purwanto, W.H. (2010). *Terorisme di Indonesia Pasca Bom Marriott 2*. Jakarta: CMP Press.
- Tressa, R. (2018). Policy Network dalam Kebijakan Kontra Radikalisme Di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11(1), 49.
- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright protection of art containing nudist elements under positive law in Indonesia. *Law and Justice*, 6(2), 161-173.
- Thalib, P., Kholiq, M. N., & Wijaya, O. Y. A. (2023). BANK GUARANTEE CLAIMS AS COLLATERAL FOR BENEFICIARY IN CONSTRUCTION PROJECTS. *Russian Law Journal*, 11(2), 250-259.
- Shomad, A., & Thalib, P. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum*. Airlangga University Press.
- Christawan, E., Ariadi, S., Thalib, P., Astika, D., & Suyanto, B. (2023). Enhancement of Polri's Role in Dealing with Disinformation and Radicalism Extremism Terrorism and Separatism Propaganda in Cyberspace.
- Septiadi, H., & Thalib, P. (2022). Peran Budaya Organisasi Dalam Optimalisasi Penerapan Elektronik Manajemen Penyidikan (E-Mp) Di Satreskrim Polres Ponorogo. *Janaloka*, 1(2), 1-19.
- Faisal, R., & Thalib, P. (2022). Kinerja Organisasi Direktorat Pidana Umum Dengan Diterapkannya Adaptasi Kebiasaan Baru Sebagai Budaya Organisasi (Studi Di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur). *Janaloka*, 1(2), 20-43.
- Kurniawan, F., Thalib, P., Subhan, M. H., Jansen, B., & Abd Ghadas, Z. A. B. (2023). Justice as a Meta Value of Corrective Justice in Providing Restitution for Unjust Enrichment: A Study on Rules, Norms, Principles, and Foundation. *Jurnal Hukum*, 39(2), 192-211.